

# **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO**

*Oleh*

**FERA HANDAYANI**

## **Abstrak**

*Dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado.*

*Kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik.*

*Evaluasi PPK di Kecamatan Singkil kota Manado, telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan PPK telah cukup efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Pola-pola yang lebih partisipatif perlu terus dikembangkan agar kemandirian masyarakat cepat tercapai. Peran serta masyarakat perlu terus diperluas mengingat peran yang paling dominan selama ini dalam PPK, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.*

***Kata Kunci : PPK, Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai suatu pendekatan pembangunan alternatif, fokusnya tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi guna melindungi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Singkil Kota Manado.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado dari tahun 2007 s.d 2009 berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana. Diantara prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan, jembatan guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat, prasarana saluran untuk mencegah banjir dan kenyamanan lingkungan perdesa/kelurahan, irigasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengaliri persawahan, jenis prasarana yang menunjang perekonomian seperti pemberian dana simpan pinjam bagi khusus perempuan (SPP).

Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik. Dari hal tersebut maka akan dilakukan kajian terhadap Evaluasi Kebijakan Program pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai sebuah kebijakan tentunya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Singkil Kota Manado.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Singkil Kota Manado.
2. Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Singkil Kota Manado.

### **Tinjauan Pustaka**

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program- program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact / outcome dan policy output. “Policy Impact / outcome ” adalah akibat- akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan “Policy output” ialah dari apa- apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah ( Islamy, 1986 : 114-115).

#### Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya serangkaian kegiatan, langkah atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terprogram yang menggambarkan adanya upaya merubah individu, masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan, dengan cara memberikan atau mengalihkan daya, kemampuan, kekuatan.

#### Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan PPK merupakan salah satu kebijakan program pemberdayaan masyarakat pedesa/kelurahan/kelurahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) lebih memfokuskan pada pemberdayaan manusia menjadi prioritas utamanya, karena dengan semakin berdayanya manusia pada gilirannya akan meningkatkan daya masyarakat secara keseluruhan.

Adapun tujuan umum PPK menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (2007: 1) adalah “Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi”. Sedangkan tujuan khusus PPK yaitu: (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin

dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesa/kelurahan yang berkelanjutan; (4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; (6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa/kelurahan/kelurahan (BKAD); dan (7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesa/kelurahan/kelurahan.

### **Pembahasan**

Pelaksanaan PPK berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado dan pemerataan pendapatan keluarga miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan sosial dasarnya. Peningkatan kapasitas masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado ditandai dengan semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang diperoleh melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan dalam Program Pengembangan Kecamatan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki setelah mereka mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kecamatan merupakan modal dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosialnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dan sosial masyarakat yang berarti kapasitas masyarakat Kecamatan Singkil juga akan meningkat. Pelaksanaan kegiatan PPK dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi daerah dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan.

PPK melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak baik di desa/kelurahan maupun di kecamatan, diantaranya adalah TPK, kelompok SPP, kelompok UEP,

UPK, dan BP-UPK. Keberadaan lembaga pengelola ini pada umumnya bersifat *ad hoc*/sementara (berkaitan dengan kebutuhan program), akan tetapi seiring dengan pendampingan yang baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka beberapa lembaga pengelola telah menjadi lembaga permanen, berkaitan dengan statutenya. Hal ini didukung kebijakan nasional.

Sejak adanya Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Singkil Kota Manado baik yang berasal dari alokasi APBN maupun APBD, tingkat pembangunan masyarakat meningkat, ini dikarenakan adanya perhatian pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya PPK merupakan angin segar bagi masyarakat dan masyarakat sangatlah puas dengan program pengembangan kecamatan, semangat masyarakat untuk membangun prasarana telah dibangkitkan lagi. PPK membuat masyarakat terangsang untuk memperoleh pinjaman-pinjaman untuk penambahan modal usaha mereka.

Efisiensi pelaksanaan program Kebijakan PPK dalam memberdayakan masyarakat dilihat dari sejauhmana capaian yang diperoleh dalam hal peningkatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado. Dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado tahun 2010, yang difokuskan kepada peningkatan prasarana/sarana fisik dan dana pinjaman khusus untuk kaum perempuan. Pada kegiatan peningkatan sarana infrastruktur dan pemberian dana pinjaman kepada kaum perempuan, merupakan peningkatan kapasitas pembangunan masyarakat yang menjadi komponen utama dalam pemberdayaan masyarakat kecamatan. Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Singkil Kota Manado secara langsung dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator yaitu kebutuhan masyarakat terhadap bantuan, kehadiran dan keterlibatan orang miskin dalam setiap tahapan program, kehadiran/keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, tingkat keswadayaan masyarakat, dukungan pemerintah lokal dalam setiap tahapan PPK serta tingkat pemanfaatan sarana/prasarana yang telah dibangun.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado, diperoleh manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado yang diterima dibagi atas dua kelompok, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung.

A. Manfaat Langsung meliputi :

1. Terciptanya lapangan kerja. Dengan adanya PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado, Kegiatan prasarana PPK telah memberi manfaat yang besar kepada masyarakat.
2. Berkembangnya usaha kecil di Kecamatan Singkil. Dana bergulir yang dikucurkan sangat membantu masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha kecil dalam hal permodalan.

B. Manfaat Tidak Langsung

1. Terciptanya *team work* yang baik sesama pengelolaan kegiatan.
2. Terbentuknya rasa kepedulian masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.

Evaluasi kebijakan PPK mencakup dampak dari kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat yakni masyarakat Kecamatan Singkil yang memberikan dampak masa sekarang dan mendatang. Evaluasi PPK telah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program PPK berlangsung, serta menunjukkan faktor-faktor yang dapat disiasati supaya dapat memperoleh pencapaian hasil yang lebih baik.

Dari evaluasi tersebut akan dapat diketahui kemajuan yang dicapai, hal tersebut mengandung adanya fungsi pengendalian, seluruh aktivitas yang menjamin agar hasil-hasil aktual dapat sesuai dengan hasil-hasil.

## **Penutup**

### Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Singkil kota Manado didasarkan pada

adanya jenjang aturan yang jelas dimulai dari tingkat pusat, dilimpahkan ke tingkat daerah yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan kemudian diimplementasikan di tingkat kecamatan. Pelaksanaan PPK didukung oleh peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang kuat, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan.

Hasil evaluasi PPK di Kecamatan Singkil kota Manado, telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan PPK telah cukup efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Singkil kota Manado. Disisi efisiensi, menunjangnya pembangunan dan perekonomian masyarakat, merupakan dampak yang diinginkan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota manado, dari sisi responsivitas program ini telah memenuhi ekspektasi dan preferensi dari masyarakat, yang pada akhirnya telah meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Singkil kota Manado.

#### Saran

Program pemberdayaan masyarakat berupa PPK yang sekarang ini disebut PNPM Mandiri Perkotaan perlu terus ditingkatkan untuk memajukan pembangunan masyarakat di Kecamatan Singkil kota Manado. Perlu terus dilakukan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan PPK, hal ini di butuhkan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap PPK, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan penolakan dan pelanggaran. Peran serta masyarakat perlu terus diperluas mengingat peran yang paling dominan selama ini dalam PPK, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharmini, 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu. PT Rineka Cipta.
- Dolbear, Kenneth M. (ed). 1975. *Public Policy Evaluation*. California : Sage Publication, Inc.
- Dunn, N. William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada : University Press.
- Dye, T.R. 1981. *Policy Analysis*. New Jersey : The University of Alabama Press.
- Friedman, John. 1993. *Empowerment : The Politics of Alternative Development Massachusetts*. MIT Press.

- Gedeian, Arthur, G. 1991. *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver.
- Hogwood, B. W. & Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis For The Real World*. New York : Oxford University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kismartini, dkk. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Korten, David. C & Sjahrir. 1996. *Pembangunan Berdemensi Kerakyatan*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Mahmudi, 2005. *Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Milles, Nathew B & A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analisis*. California : Sage Publication Inc.
- Mustopadjaja. 2005. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. PT. Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pt. Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.